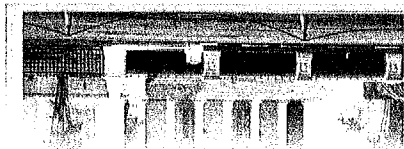
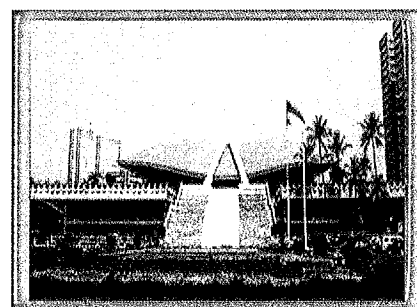
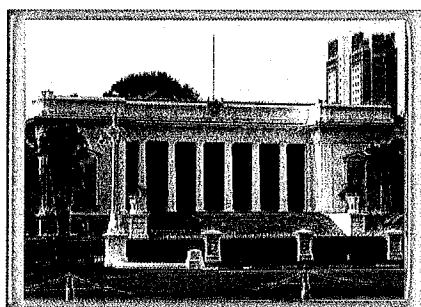


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2011

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2005-2010



Nomor : 24d/LHP/XV/05/2012

Tanggal : 24 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210

Telp / Fax (021) 25549000

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT	1
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2005 - 2010	3



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2005 – 2010. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan BPK telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas 36 temuan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2005 - 2010 yang belum selesai ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

No.	LHP LKPP	Jumlah Temuan	Hasil PemantauanTindak Lanjut		
			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti
1	Tahun 2010	18	5	13	0
2	Tahun 2009	6*	4	2	0
3	Tahun 2008	7*	4	3	0
4	Tahun 2007	3*	1	2	0
5	Tahun 2006	1	1	0	0
6	Tahun 2005	1	1	0	0
Total		36	16	20	0

* Laporan Tindak Lanjut Tahun 2005-2009 melaporkan terdapat 18 temuan tahun 2009, 11 temuan tahun 2008, dan 4 temuan tahun 2007 yang belum sesuai/selesai, tetapi 17 temuan di antaranya dilaporkan kembali dalam LHP Tahun 2010. Dengan demikian, pemantauan atas 17 temuan tersebut merupakan bagian dari pemantauan 18 temuan di tahun 2010 dan 16 temuan lainnya dilaporkan sebagai pemantauan tindak lanjut tahun 2009, 2008 dan 2007.

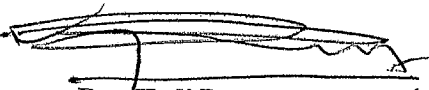
Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) menetapkan seluruh sistem akuntansi sehingga lingkup pelaporan di LKPP menjadi jelas, terakhir dengan menetapkan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah, Transaksi Khusus, dan Badan Lainnya pada Tahun 2011; (2) menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah sehingga dapat memudahkan pengesahan hibah langsung, Sistem Penerimaan Negara sehingga dapat memantau transaksi reversal dan menjelaskan selisih yang terjadi, dan sistem pencatatan dan rekonsiliasi Piutang Perpajakan sehingga catatan piutang didukung dokumen sumber; (3) mengubah penyelesaian PPN Ditanggung Pemerintah menjadi Subsidi PPN atas penyerahan jenis BBM tertentu oleh Badan Usaha

kepada Pemerintah; (4) menetapkan peraturan atas pengelolaan BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; serta (5) menetapkan Badan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bawaslu, LPP RRI, LPP TVRI, dan Badan Pengembangan Kawasan Sabang sebagai Pengguna Anggaran di APBN Tahun 2012.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah: (1) mengupayakan amandemen formulasi perhitungan *sharing* antara Pemerintah dengan KKKS yang disesuaikan dengan penerapan *tax treaty*, (2) perbaikan sistem pengelolaan perpajakan KKKS, (3) perbaikan peraturan penetapan objek PBB Migas, (4) penertiban pungutan PNBPN dan/atau penyeteran PNBPN dan hibah langsung di KL, (5) penertiban dan penyempurnaan sistem pencatatan transaksi-transaksi non anggaran dan transaksi lain yang mempengaruhi SAL, (6) penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan penyusunan aturan teknis mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero), serta (7) penyelesaian IP Aset Tetap, Aset KKKS, dan Aset Eks BPPN serta penyempurnaan pembukuannya.

Rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2012
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
KETUA, 


Drs. Hadi Poernomo, Ak
Register Negara No. D-786 

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2005 -2010

Tahun Temuan	No.	Jurnal Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut		
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2010															
2010	1	Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp965,40 Miliar Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI dan Transaksi Pembatalan (Reversal) Penerimaan Perpajakan Senilai Rp3,39 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.	0,00	√	√	√	√	√	BPK merekomendasikan agar Pemerintah menyempurnakan sistem pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi penerimaan pajak dan bea cukai yang terintegrasi antara DJP, DJBC, serta DJPB.	1) Pemerintah telah dan sedang menyempurnakan sistem pencatatan transaksi penerimaan melalui Bank/Pos Persepsi. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK No.60/PMK.5/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (<i>Billing System</i>). Pemerintah sedang melakukan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> terhadap aplikasi dan sistem <i>billing</i> yang dikembangkan oleh PT Pos Indonesia. 2) Pemerintah telah melakukan UAT ulang pada 81 Bank/Pos Persepsi	√				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
- X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 3 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tahun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai/ Belum Ditindak Lanjut	Belum Ditindak Lanjut	
											dari jumlah keseluruhan 82 Bank/Pos Persepsi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam menatausahakan penerimaan negara. Bank Persepsi yang belum di UAT ulang adalah PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk.				
											3) Pemerintah melakukan penyempurnaan peraturan rekonsiliasi perpajakan pada tahun 2011 dan mngintensifkan rekonsiliasi bulanan antara data SAI/MPN dengan SAU/Kas Negara. Dirjen Perbendaharaan telah menerbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara sebagai upaya				

Keterangan:

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
- X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 4 dari 52



Tahun Temuan	No	Induk Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut/Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	
										penyempurnaan Peraturan Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sektor Perpajakan pada Sistem Akuntansi Instansi. Hasil rekonsiliasi selisih data Penerimaan Pajak antara SAU dan SAI senilai Rp482,50 miliar terdiri dari data senilai Rp409,13 miliar telah tercatat di rekening kas negara dan Rp73,37 miliar telah dikonfirmasi ulang oleh Bank/Pos Persepsi dengan hasil total transaksi yang dibatalkan Rp70,56 miliar, total transaksi sudah dilimpahkan menjadi Rp2,79 miliar, dan total transaksi yang belum dilimpahkan senilai Rp10,84 juta.					

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
- X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 5 dari 52



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak lanjuti	

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 6 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Ribu Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai	Belum Selesai	
										Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara. Selain itu, DJP melakukan konfirmasi ke KPP untuk ditindaklanjuti. 7) Pemerintah telah menindaklanjuti <i>unmatch</i> antara SAI dan SAU pada DJBC. Sampai per 30 November 2011 dari jawaban saker berdasarkan SSPCP diperoleh 1.890 <i>record</i> SAI yang belum ditemukan dokumen sumbernya senilai Rp49,49 miliar. 8) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Dirjen BC No. 23/BC/2011 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Penerimaan pada DJBC sebagai dasar rekonsiliasi pelaksanaan penerimaan secara periodik dan berjenjang. 9) Pemerintah melakukan pembahasan dengan PT Pos					

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 7 dari 52



Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai/ Belum Sesuai	Belum Dilakukan	
										mengenai penyempurnaan aplikasi pos pabean dan penyusunan strategi implementasi aplikasi pabean atas transaksi barang kiriman pos (PPKP) sesuai surat undangan PT Pos Nomor 928/Posint/0611 tanggal 17 Juni 2011. 10) Pemerintah menindaklanjuti transaksi SAU <i>ummatch</i> yang tidak mempunyai kode kantor BC sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan sektor perpajakan. Transaksi SAU <i>ummatch</i> tersebut dicatat sebagai penerimaan satker Kantor Pusat DJBC.					

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 8 dari 52



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut	
2010	2	Pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal sehingga selisih kewajiban PPh Migas sebesar Rp1,25 triliun tidak dipantau dan kekurangan PPh Migas sebesar Rp2,6 triliun belum ditagih.	2,6 triliun	√	X	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Menetapkan dengan jelas pembagian kewenangan antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS; b. Memperbaiki mekanisme monitoring dan penagihan kewajiban PPh Migas; dan c. Memverifikasi selisih kewajiban PPh Migas dan menagih kekurangan PPh Migas.	1) Pemerintah memperbaiki mekanisme <i>monitoring</i> dan penagihan dengan membuat PMK dan aturan teknis PP 79 Tahun 2010. Pemerintah telah menerbitkan 3 PMK (PMK-256/PMK-011/2011, PMK-258/PMK-011/2011, PMK-257/PMK-011/2011) dan 2 Perdiin Pajak (PER-28/PJ/2011 dan PER-29/PJ/2011), sedangkan 2 RPK masih dalam proses finalisasi. RPK yang sedang disusun akan mengatur kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait administrasi perpajakan KKKS. 2) Pemerintah menguji kebenaran perhitungan PPh Migas dan Pajak lainnya berdasarkan PP No. 79/2010 yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap KKKS.	√			

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 9 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dindaklanjuti	
									</					

Keterangan:

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 10 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006			2005	Sesuai	Belum Sesuai	
		langsung minimal sebesar Rp868,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN.						kepada Pemerintah agar menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh KL diantaranya dengan: a. menyempurnakan PMK Nomor 40/PMK.5/2010 dan peraturan teknis lainnya yang mengatur mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan, pencatatan, pelaporan, dan pengesahan hibah; b. menetapkan kebijakan yang mengatur penunjukan satker yang bertanggung jawab untuk mengelola hibah di masing-masing KL; dan c. memperbaiki metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang	Sistem Akuntansi Hibah dengan menerbitkan PMK Nomor: 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, PMK Nomor: 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan Peraturan Dirjen PBN No. Per-81/PB/2011 tentang Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga. 2) Pemerintah mengintensifkan penerapan PMK No. 33/PMK.08/2010 mengenai Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah. 3) Pemerintah mengintensifkan sosialisasi tentang akuntansi dan pelaporan hibah langsung yang diterima oleh K/L. K/L telah				

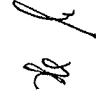
Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 11 dari 52



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	
									dikirimkan kepada lembaga donor.	melakukan registrasi pendapatan hibahnya kepada DJPU-Kementerian Keuangan dan mengungkapkannya dalam Laporan Keuangan K/L yang bersangkutan. 4) Kementerian Keuangan sudah menyampaikan surat kepada K/L agar menyusun pedoman atau Standard Operating Procedures (SOP) hibah pada masing-masing K/L. Beberapa K/L telah menyusun pedoman atau SOP dimaksud, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan					
2010	5	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan		X	√	X	X	X	BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan	1) Pemerintah sedang menyelesaikan ketentuan mengenai dana bansos yang disalurkan melalui dana penampungan/lembaga penyimpanan. 2) Pemerintah sedang menyusun draf Perdirjen tentang Petunjuk		√			

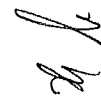
Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 12 dari 52



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keberhasilan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	
									intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.	Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan dana Bansos pada K/L. 3) Pemerintah telah menyusun PMK No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan PMK No. 101/PMK.02/2011 ttg Klasifikasi Anggaran sebagai amanat PP 90 Tahun 2010. 4) Pemerintah telah dan akan terus melakukan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban bantuan sosial. 5) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan surat kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada K/L terkait untuk meningkatkan pengawasan atas penyaluran bantuan sosial. 6) Pemerintah yakni BPKP dan Kementerian Keuangan telah melakukan sosialisasi peningkatan peran APIP K/L dalam penyaluran				

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 13 dari 52

Tahun Temuan	No	Induk Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	Belum Dilanjut		
															</	

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 14 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	Belum Dilakukan	
										miliar dengan menerima pertanggungjawaban dari penerima bantuan. Kementerian Kesehatan sedang/ telah melakukan penelusuran sisa dana, melakukan monitoring penyaluran dana bansos BOK, Jamkesmas, Poskestren TA 2010 dan telah menyetorkan sebagian ke kas negara sebesar Rp7,69 miliar. 10) Pemerintah menindaklanjuti sisa dana bantuan tidak tersalurkan yang belum disetor ke kas negara. Kementerian Pendidikan Nasional menyetor sebesar Rp66,3 miliar dari Rp69,33 miliar. Kementerian Pertanian menyetor Rp7,66 miliar dari Rp10,73 miliar. Kementerian Sosial telah menyetor sebesar Rp1,39 miliar.					
2010	6	Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Tidak Sesuai dengan Kegiatan	0,00	√	√	√	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Mengoptimalkan kembali verifikasi	1) Pemerintah mengintensifkan sosialisasi penggunaan Bagan Akun Standar (BAS). Sosialisasi BAS telah dan terus dilakukan	√				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 15 dari 52



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut		
		yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun							terkait penyusunan anggaran KL dan Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal; dan b. Menetapkan status LPP kelengkapan TVRI, LPP RRI, Badan Pengembangan Kawasan Sabang, dan Bawaslu.	kepada penelaah di DJA, pejabat/pegawai di Kanwil dan KPPN, serta pejabat/pelaksana bidang perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran di K/L. 2) Pemerintah telah menetapkan PMK No.93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL pada tanggal 27 Juni 2011 yang memuat definisi, pengertian dan contoh-contoh yang lebih detail mengenai jenis belanja. 3) Pemerintah telah melakukan pengeseran anggaran Belanja Lain-lain ke anggaran K/L pada TA 2011 sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a pada UU APBN-P Tahun 2010. 4) Pemerintah telah menetapkan BP Batam (BA 112), Bawaslu (BA 115), LPP RRI (BA 116), LPP TVRI (BA 117), dan BPKS (BA					

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 16 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Selesai	Belum Ditemukan	
2010	7	Uang Muka dari Rekening BUN Sebesar Rp1,88 Triliun yang Disajikan pada LKPP Tahun 2010 Belum Dapat Diyakini Kewajarannya		√	√	X	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penertiban dan penyempurnaan atas pengelolaan reksus dan dana talangan dari Rekening BUN dalam rangka pencairan pinjaman/hibah luar negeri BUN.	118) sebagai pengguna anggaran di APBN tahun 2012 5) Beberapa K/L telah memberikan teguran kepada pengelola keuangan yang tidak merealisasikan belanja sesuai dengan anggarannya, dan menginstruksikan agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran. 1) Pemerintah mengkoordinasikan dengan K/L selaku <i>executing agency</i> . Surat permintaan <i>replenishment/ reimbursement</i> sudah disampaikan kepada <i>Executing Agency</i> dari Kementerian/Lembaga atas keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban kepada Pemberi PHLN. 2) Pemerintah telah menerbitkan PMK No.78/PMK.05/2011 tentang Penyelesaian <i>Backlog</i> atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar	√				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 17 dari 52

26/12

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	
											Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang <i>Ineligible</i> . 3) Pemerintah telah memberikan KMK No.119/KMK.05/2011 tentang Penetapan Jumlah <i>Backlog</i> atas Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus yang <i>Ineligible</i> dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 (<i>Audited</i>) 4) Pemerintah telah menyusun Bisnis Proses Tata Cara Penarikan dan Pengelolaan Rekening Pinjaman dan Hibah, dan saat ini sedang dalam pengembangan aplikasinya. 5) Pemerintah sedang menyempurnakan sistem akuntansi dan pelaporan Rekening Khusus dan Rekening Dana Talangan. 6) Pemerintah telah melaksanakan pemetaan data untuk tahun 2009 dan 2010, dengan hasil terdapat dana talangan sebesar Rp17,48				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 18 dari 52

Handwritten signature

Tahun Temuan	No	Jumlah Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	
										miliar dan <i>reimbursement</i> sebesar Rp197,99 miliar yang belum dipetakan. 7) Pemerintah telah melaksanakan rekonsiliasi data PHLN dan upaya penyelesaian masalah terkait PHLN dengan <i>Executing Agency</i>. Rekonsiliasi data PHLN dengan <i>executing agency</i> akan dilakukan secara menyeluruh terhadap PHLN yang ada, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan antara lain: batas waktu <i>closing date/closing account</i> atau PHLN yang memiliki permasalahan untuk segera diselesaikan 8) Pemerintah telah melengkapi data WA yang besarnya lebih kecil daripada <i>reimbursement</i>-nya. Data mengenai tanggal, nomor dan besaran WA telah dapat disediakan sehingga perbandingan antara nilai WA dan <i>disbursement</i>-					

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 19 dari 52



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	Belum Dilanjut		
													</			

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 20 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak lanjuti		
2010	9	Aset Tetap yang Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 Belum Seluruhnya Dilakukan IP, Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung dengan Pencatatan Penggunaan Barang yang Memadai	0,00	√	√	√	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Melakukan verifikasi dan menyempurnakan hasil IP Aset Tetap dan pencatatannya; b. Menyusun <i>action plan</i> penerapan penyusutan; c. Memproses penetapan PP tentang BPYBDS;	DJP membangun aplikasi yang mengintegrasikan seluruh transaksi perpajakan yang mempengaruhi Piutang Pajak. 2) Pemerintah akan melaksanakan rekonsiliasi data pembayaran PBB antara MPN dan BO III 3) Pemerintah melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran PBB khususnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan dalam aplikasi SISMOIP. 4) DJP dan DJBC melakukan rekonsiliasi pencatatan SP3DRI.	√				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 21 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tahun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak lanjuti		
									dan d. Menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP dan melaksanakan penyerahan BMN eks DK/TP kepada Pemerintah Daerah terkait.	atau mengklarifikasi kembali atas koreksi hasil IP sater K/L. Beberapa K/L telah melakukan rekonsiliasi dan klarifikasi hasil IP, serta melakukan koreksi nilai pada laporan keuangan. 3) Pemerintah sedang mengumpulkan dan memetakan data sater dan data BMN yang belum di-IP atau sudah di-IP tapi nilainya belum wajar. 4) Pemerintah sedang melakukan IP dan berkoordinasi dalam rangka percepatan IP BMN. 5) Pemerintah melakukan pembinaan dan asistensi pada seluruh K/L terutama terkait <i>monitoring</i> koreksi IP. 6) Pemerintah sedang menyusun RPKM tentang penyusutan. 7) Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi sosialisasi dan <i>piloting</i> pada beberapa K/L.					

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 22 dari 52



Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak lanjuti			
									</							

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 23 dari 52



Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak lanjuti			
					</											

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 24 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Penuntutan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dituntun		
										Anggaran 2011. 11) Pemerintah telah menyempurnakan SIMAK BMN dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN sesuai PMK No. 29/PMK.06/2010 dan semua K/L sudah melakukan migrasi dari aplikasi SIMAK lama ke SIMAK baru per- Semester I 2011.					
2010	10	Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Eks KKKS Belum Memadai	0,00	√	√	√	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS yang saat ini masih berlangsung serta memverifikasi hasil IP yang telah selesai dilaksanakan.	1) Pemerintah menerapkan Bultek Inventarisasi yang telah disempurnakan mengenai metode dan pengendalian atas IP BMN KKKS. 2) Pemerintah sedang melakukan verifikasi dan memperbaiki Hasil IP atas Aset KKKS meliputi: penggunaan kurs sesuai dengan tanggal perolehannya <i>place into service</i> (PIS); status sumur yang tidak digunakan; penyusunan foto-foto aset KKKS; dan pembahasan tentang <i>subsequent expenditure</i> .	√				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 25 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketera- ngan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut		
										3) Pemerintah akan melanjutkan IP BMN KKKS yang belum diselesaikan.					
2010	11	Pengendalian penatausahaan aset eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi belum memadai		√	X	X	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan penatausahaan dan pelaksanaan IP atas aset-aset eks BPPN.	1) Pemerintah dalam proses menyusun pedoman untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi aset kredit dan properti eks BPPN. 2) Pemerintah telah meminta data jumlah dan nilai aset kredit yang telah diserahkan kepada KPKNL dan Kanwil setempat. Namun, kegiatan inventarisasi, verifikasi dokumen aset, dan rekonsiliasi data penyerahan pengurusan aset kredit dengan PUPN melalui KPKNL belum diselesaikan sehingga kepastian jumlah dan nilai aset kredit eks BPPN belum diperoleh seluruhnya. 3) Pemerintah akan melakukan pengadaan jasa konsultan penilaian untuk menentukan nilai wajar aset properti eks BPPN.		√			

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 26 dari 52



Tahun Temuan	No.	Induk Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	
2010	12	Status Penitipan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas		√	X	√	X	X	BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero).	1) Pemerintah sedang menyempurnakan kebijakan dan aturan mengenai penyelenggaraan program pensiun PNS. Kementerian Keuangan bersama Kementerian PAN dan RB, BKN, Setkab dan Setneg telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan kesepakatan bahwa Pemerintah akan merevisi PP 25/1981 tentang Asuransi Sosial PNS. Sistem yang akan diterapkan adalah "Pay As You Go". 2) Pemerintah masih mengkaji status dana pensiun yang ada di PT TASPEN.	√				
2010	13	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih Berbeda dengan Rincian Fisik Kas	0,00	√	√	√	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi terkait temuan dalam LHP LKPP tahun 2009 dan memperbaiki pengelolaan dan pencatatan	1) Pemerintah sedang menyusun PMK mengenai perlakuan selisih kurs. 2) Pemerintah telah menyusun petunjuk penyelesaian permasalahan Kas di bendahara Pengeluaran. Pemerintah telah	√				

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut	
									transaksi yang berpengaruh terhadap SAL, antara lain PFK dan Uang Muka dari Rekening BUN.	melaksanakan penelusuran dan identifikasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran. 3) Pemerintah telah mengidentifikasi data dana talangan sebesar Rp15,55 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp70,29 sudah dikonfirmasi kepada BPK.					
LHP Kepatuhan Tahun 2010															
2010	14	Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas Sehingga Realisasi PBB Migas Sebesar Rp19,30 Triliun Tidak Diyakini Kewajarannya							BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Mengatur lebih jelas mengenai objek pajak PBB Migas dengan mempertimbangkan UU PBB dan UU Migas; b. Memperbaiki mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas; dan c. Melakukan inventarisasi dan	1) Pemerintah telah melengkapi tagihan PBB Migas dengan SPPT dan memproses pembayaran triwulan I & II Tahun 2011 sesuai dengan tagihan. Pembayaran PBB Migas sebesar Rp19,3 T sesuai dengan SPPT PBB Migas tahun 2010 sebagai dasar penagihan, yang telah disampaikan ke DIA dengan surat Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian nomor S-525/PJ.06/2011 tanggal 5 Mei 2011 dan S-1266/PJ.06/2011 tanggal 26 Agustus 2011. 2) Pemerintah sedang menyusun	✓				

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 28 dari 52



Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dindak Lanjut		
									memperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran PBB Migas, yaitu Belanja Transfer ke Daerah dan Upah Pungut.	perbaikan ketentuan pengenaan PBB Migas dan SOP link. 3) Pemerintah telah melaksanakan analisis data spasial.					
2010	15	Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28 Triliun melalui Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah Tidak Sesuai dengan UU PPN		√	X	X	X	X	BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menerapkan mekanisme penyelesaian PPN DTP sesuai dengan UU PPN.	1) Pemerintah telah melakukan pembahasan APBN-P 2011 dengan DPR yang menyepakati hal-hal sebagai berikut: a. PPN DTP telah dihapuskan dalam APBN-P 2011. b. Dalam APBN-P 2011, termasuk dalam belanja Subsidi BBM adalah pajak atas Subsidi BBM. c. Kementerian Keuangan berdasarkan kesepakatan dengan BPK sedang menyusun kajian tentang pajak atas Subsidi BBM.	√				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 29 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemanfaatan Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak lanjuti	
										2) Pemerintah menerbitkan KMK No.02/KM.3/2011 untuk membatalkan SPM PPN DTP Tahun 2010 senilai Rp21,45 triliun. 3) Pemerintah telah menerbitkan PMK No.217/PMK.02/2011 stdd. PMK No.65/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan PMK No.218/PMK.02/2011 stdd. PMK No.64/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi LPG Tabung 3 Kilogram. 4) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No.Per-40/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan SSP				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
 X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 30 dari 52



Tahun Temuan	No.	Induk Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dimulai	Belum Dimulai	
2010	16	PNBP pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp213,75 Miliar Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN		✓	X	✓	✓	✓	BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBPN.	atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kilogram. 1) Pemerintah telah mendorong pimpinan K/L melalui Menteri Keuangan dengan menyampaikan surat kepada Pimpinan K/L untuk memberikan sanksi kepada pejabat pengelola PNBPN yang mengelola PNBPN tidak sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Pemerintah sedang menyusun RPKM tentang sanksi atas pengelolaan PNBPN yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		✓			
2010	17	Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas							BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai pengalokasian Dana Penyesuaian tersebut.	1) Pemerintah telah menyampaikan Dana Penyesuaian kepada DPR dalam pembahasan APBN-P TA 2012 dan telah memasukkan kriteria-kriteria alokasi Dana Penyesuaian yang terukur dalam		✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 31 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Penuntutan Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut	
2010	18	Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda, Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban							BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.	UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2010. 2) Pemerintah sedang merevisi UU No 33 Tahun 2004. 1) Pemerintah memberikan pembinaan kepada pegawai dan beberapa K/L telah menyampaikan teguran kepada satkernya terkait perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan. 2) Beberapa K/L telah menyertakan kelebihan biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang tidak dilaksanakan ke Kas Negara. 3) Pemerintah melakukan verifikasi perjalanan dinas dengan dokumen sumbernya. 4) Pemerintah telah membentuk tim pada Kementerian Keuangan yang menangani penyusunan SOP perjalanan dinas. 5) Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksana	✓			

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 32 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tahun Rangkap)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	Lanjut	
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2009															
2009	19	Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang Dilaporkan LKPP Belum Sepenuhnya Menggambarkan Jumlah dan Saat Dana yang Ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri	0,00		√	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah agar mencatat dan mengakui penarikan PLN berdasarkan dokumen sumber yang mutakhir dan menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi PLN.				√		
- Pemerintah telah menerbitkan dan melaksanakan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. - Pemerintah sedang menyempurnakan proses bisnis dalam tata cara penarikan PHLN dan struktur rekening serta konsep akuntansi pengelolaan reksus dan dana talangan karena Reksus kosong. - Pemerintah sedang menyusun revisi PMK No.143/PB/2008 tentang Tata Cara Pencairan Pinjaman dan Hibah															

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 33 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	
2009	20	Pemerintah Belum Menerapkan Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Selisih Kurs	0,00		X	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan akuntansi terkait pengakuan selisih kurs.	Luar Negeri. sedang dalam tahap finalisasi. Revisi pengakuan pembiayaan dan penerimaan hibah diakui berdasarkan NoD, sementara pengakuan belanja didasarkan pada SP2D/SP3. - Pemerintah telah mengkaji terkait selisih kurs dan menetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 71/PB/2010 tentang Perlakuan akuntansi atas selisih kurs pada rekening milik BUN pada tanggal 31 Desember 2010. - Saat ini Pemerintah sedang mengembangkan aplikasi untuk pelaporan di LRA dan LAK. LKPP Tahun 2010 telah mengkaji adanya selisih kurs. - Pemerintah sedang memfinalisasi Konsep Buletin Teknis SAP tentang Selisih Kurs.		√		
2009	21	Saldo Kas di Bendahara	0,00		√	X	X	X	BPK merekomendasikan	- Sebagai tindak lanjut diterbitkannya	√			

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 34 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	Belum Dilakukan		
		Pengeluaran yang Dilaporkan di Neraca LKPP Tidak Mencerminkan Saldo Kas yang Sebenarnya							agar Pemerintah memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran agar menyelenggarakan pembukuan secara tertib termasuk dalam melakukan rekonsiliasi sesuai dengan PMK No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.	PMK Nomor: 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009, Pemerintah telah menyiapkan aplikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran. Saat ini aplikasi tersebut telah dilakukan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> . Aplikasi LPJ akan segera diterapkan/digunakan oleh para Bendahara Pengeluaran/Satker, KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN). - Pemerintah terus melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada Bendahara Pengeluaran satuan kerja. - Pemerintah telah dan akan melakukan koordinasi dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan uang persediaan.						
2009	22	Pencatatan dan Pelaporan	0,00		√	√	√	√	BPK merekomendasikan	- Pemerintah mendorong K/L untuk	√					

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 35 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemanfaatan Tindak Lanjut			Kelembagaan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	
		Persediaan per 31 Desember 2009 Tidak Berdasarkan <i>Stock Opname</i> dan Tidak Didukung Penatausahaan yang Memadai							Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan di KL.	melakukan penghitungan fisik. Beberapa KL telah menyampaikan kepada satker yang berada di lingkungannya untuk melakukan perhitungan fisik (<i>stock opname</i>) atas jumlah persediaan pada saat tanggal pelaporan. - Pemerintah (dhi. DJKN) telah mengadakan sosialisasi-sosialisasi peraturan-peraturan baru terkait kebijakan penatausahaan BMN, berikut pembinaan, bimbingan teknis, dan asistensi pengoperasian aplikasi persediaan pada tingkat pusat KL untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh kepada unit kerja vertikal yang berada di bawahnya. - Pemerintah telah dan akan terus melaksanakan peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan. - Pemerintah akan terus melaksanakan rekonsiliasi BMN				
2009	23	Pencatatan dan Pengelolaan Barang	0,00		√	√	√	√	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan					

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 36 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Juta Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	
		Milik Negara Belum Dilakukan Secara Tertib							Pemerintah agar : a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi data aset tetap serta menerapkan sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan rekon; b. Merevisi kebijakan yang dikeluarkan satker agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN; dan c. Melakukan pembinaan kepada KL agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai ketentuan khususnya dalam hal pengamanan aset.	secara berjenjang sesuai dengan ketentuan. - Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor KEP-57/KN/2010 dan KEP-174/PB/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara, Penyampaian Data Realisasi Belanja Modal, dan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengenaan sanksi untuk satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi BMN telah diatur dalam Nomor PER-07/KN/2009. - Pemerintah telah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang	✓				
											✓				
											✓				

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 37 dari 52

Tahun Temuan	No.	Induk Temuan	Nilai Temuan (dalam Billion Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dindak Lanjut			

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
- X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 38 dari 52

Shh

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	Lanjut	
										sosialisasi peraturan pengelolaan BMN.					
LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009															
2009	24	Terdapat Pendapatan SDA Migas dari Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2009 Sebesar Rp1,90 Triliun dan Tahun 2008 sebesar USD530.97 juta yang Belum Diperhitungkan Dalam Bagi Hasil	1,90 dan USD530.97		X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera mengklarifikasikan masalah terkait pendapatan yang tidak dibagikan dengan DPR.	Pemerintah telah meminta klarifikasi dan persetujuan kepada DPR terkait dengan perhitungan Pendapatan SDA Migas dari kegiatan usaha hulu migas tahun 2009 sebesar Rp1,90 triliun dan tahun 2008 sebesar USD530.97 juta. DPR telah menyetujui sesuai Pasal 3 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009.	√				
2009	25	Pungutan pada 13 KL Minimal Senilai Rp186,44 Miliar Tidak Ada Dasar Hukumnya dan Senilai Rp137,86 Miliar Di Antaranya Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme APBN	0,00		√	√	√	X	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera menerbitkan pungutan yang tidak sinkron dengan UU PNBPN maupun PP terkait, serta mempercepat proses penetapan PP terkait jenis dan tarif PNBPN khusus	- Dalam rangka penerbitan pengelolaan PNBPN, Pemerintah sedang menyiapkan draft PMK mengenai pengenaan sanksi terhadap KL yang tidak mengelola PNBPN secara tertib. - Pemerintah telah melaksanakan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara untuk membahas kemungkinan	√				

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 39 dari 52

Handwritten signature

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tahun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak- lanjuti		
									pada KL tertentu.	pendelegasian penetapan jenis dan tarif PNBPN kepada Menteri Keuangan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi disimpulkan bahwa pendelegasian kewenangan dimaksud tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu Pemerintah akan mempercepat revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN.					
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008															
2008	26	Pencatatan Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB Bagian Daerah Tahun 2008 Tidak Didasarkan pada Dokumen Sumber yang Memadai	0,05		X	X	X	X	Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyusun mekanisme penyaluran DBH PBB dan BPHTB Bagian Daerah yang memungkinkan koordinasi data dan rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB antara DJPK, DJPB, dan DJP.	Pemerintah (dhi. DJPK) telah melaksanakan PMK No. 126/PMK.07/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tranfer ke Daerah sebagai tindak lanjut atas permasalahan penyaluran dan pencatatan DBH PBB dan BPHTB bagian daerah belum menggabungkan realisasi DBH PBB dan BPHTB yang diterima dan/atau seharusnya diterima	✓				

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 40 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Penemuan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditrack	Belum Ditrack	
										masing-masing daerah. Pemerintah telah memvalidasi data realisasi DBH PBB dan BPHTB bagian daerah berdasarkan hasil konfirmasi ulang dari KPPN terkait.					
2008	27	Investasi Permanen PMN yang Disajikan dalam LKPP Tahun 2008 Belum Sepenuhnya Berdasarkan Data yang Valid dan Murakhir, dan Beberapa Di Antaranya Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	✓	✓	✓	✓	✓	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar segera menetapkan status BPYBDS dan memberikan sanksi yang tegas terhadap BUMN yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. - Pemerintah sedang menyusun Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN tentang Koordinasi Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah, yang mengatur jadwal penyampaian laporan keuangan BUMN <i>audited</i> kepada Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan (dhi. DIKN) agar selaras dengan jadwal LKPP. - Terkait BPYBDS (Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya): a. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh KL dan BUMN No.S-343/MK.06/2009 tanggal 4 Juni		✓				

Keterangan:

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 41 dari 52

Handwritten signature

Tahun Temuan	No	Jumlah Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Ketertan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak lanjuti		
											2009 tentang BPYBDS pada Neraca KL dan Neraca BUMN, yang menyatakan bahwa: - KL mencatat aset berstatus BPYBDS secara <i>off balance sheet</i> dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK LKKL. - BUMN mencatat aset BPYBDS sebagai aset dan penambah ekuitas, serta mengungkapkan dalam CaLK LK BUMN. - Masing-masing KL dan BUMN melakukan koordinasi terhadap rincian dan nilai aset BPYBDS dengan Kementerian Keuangan (dhi. DJKN) - Agar KL segera mengajukan permohonan penetapan status aset BPYBDS kepada				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 42 dari 52

26/4

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Penantian Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut	
2008	28	Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Dikelola oleh Direktorat SMI Sebesar Rp1,92 Triliun Tidak Diklasifikasikan Dengan Tepat dan Sebesar Rp178,09 Miliar Belum Disajikan Berdasarkan <i>Net Realizable Value</i>	0,18		X	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk: 1. mengkaji ulang klasifikasi akun atas empat skim di atas untuk selanjutnya ditentukan status pengelolaannya; dan 2. menginventarisasi proyek dana bergulir yang dikelolanya untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan.	Kementerian Keuangan c.q. DJKN. b. Sedang disusun rancangan PMK tentang BPYBDS. Pemerintah akan melakukan inventarisasi dana bergulir tersebut sesuai dengan PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada KL dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Berdasarkan inventarisasi tersebut, selanjutnya Pemerintah akan mengklasifikasikan dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyajikannya secara wajar berdasarkan <i>Net Realizable Value</i> . Pada tahun 2009, pemerintah telah mereklasifikasi Dana Bergulir yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan menjadi Aset Lain-Lain.	✓			
											✓			

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 43 dari 52

W/h

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditemukan		
										Pemerintah telah menyajikan Dana bergulir yang telah direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain tersebut sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) pada LK BA 999,04. Pemerintah menyajikan dalam LKPP dalam nilai nominal, tetapi nilai penyisihannya telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.					
2008	29	Sistem Informasi yang Mendukung Penyusunan LKPP Tahun 2008 Belum Memadai	0,00		√	√	√	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah: 1. menyelesaikan kebijakan, prosedur dan uraian tugas terkait <i>IT Policy</i> , <i>IT Strategy</i> , <i>IT Architecture</i> , dan SOP terkait pengelolaan Teknologi Informasi (TI). 2. sementara menunggu penyelesaian kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.	1. Pemerintah akan melakukan upaya-upaya penyelesaian kebijakan, prosedur, dan uraian tugas terkait <i>IT Policy</i> , <i>IT Strategy</i> , <i>IT Architecture</i> dan SOP terkait pengelolaan TI. 2. Sementara menunggu penyelesaian kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.		√			

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 44 dari 52

Tahun Penemuan	No.	Judul Penemuan	Nilai Penemuan (dalam Billion Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan	
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak lanjuti			
									mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.							
LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008																
2008	30	Pengeluaran atas Pengajuan SPM Sebesar Rp9,95 Miliar yang Dibayarkan Melalui KPPN Jakarta II Diduga Fiktif	0,01		X	X	X	X	BPK rekomendasi Pemerintah: 1. memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah terbukti lalai/bersalah atas transaksi pengeluaran fiktif, dan 2. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian atas penerbitan SP2D di KPPN khususnya	Pemerintah sudah memproses peradilan kasus ini. Masalah tersebut sedang dalam penanganan oleh pihak kepolisian. Untuk menghindari kasus serupa, pengawasan terhadap petugas pengantar SPM sudah lebih ketat, diantaranya dengan mencocokkan <i>specimen</i> tanda tangan dan pemasangan CCTV.	✓					

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 45 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditemukan	
2008	31	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas yang Berasal Dari Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17,28 Juta Berlarut-Larut	USD 17,28 juta		X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA.	Pemerintah telah melakukan kajian, dana tersebut adalah milik Pemerintah dan telah disajikan pada LKPP. Namun Pemerintah belum mengambil upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari hibah tersebut.		✓		
2008	32	Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN	0,55		X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah: 1. menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diungkapkan dalam LHP atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan <i>fee</i> bank penata usaha; dan 2. konsisten menerapkan	- Pemerintah telah menyusun <i>business process</i> pembayaran <i>fee</i> bank penatausaha melalui mekanisme APBN. Pembayaran <i>fee</i> bank penatausaha direalisasikan melalui belanja lain-lain. - Pemerintah tidak membuat komitmen baru untuk memberikan pinjaman yang bersumber dari RDI/RPD. - Pemerintah telah menyeter Saldo RDI per 31 Des 2010 sebesar Rp1,65 triliun ke RKUN.	✓			

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 46 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Ketertarikan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjut	
									mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan menganggarkan pembayarannya atas selanjutnya perijinan pinjaman Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi.	Penerimaan RDI/RPD 2010 dan selanjutnya disetor seluruhnya ke RKUN, dan mulai TA 2011 rekening RDI menjadi Rekening Penerimaan yang merupakan bagian dari RKU. Selanjutnya Pemerintah mengatur mekanisme penarikan pinjaman melalui APBN.	✓			
LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007														
2007	33	Sistem Pencatatan PNBPN atas Hasil Lelang Sitaan/Rampasan/Harta Peninggalan dan Pendapatan Penjualan Aset Tidak Memadai	0,00		N/A	✓	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengatur pencatatan dan pelaporan PNBPN terkait hasil lelang/sitaan/harta rampasan dan penantauan dan pengawasannya.	Pemerintah akan mengatur pencatatan dan pelaporan PNBPN terkait hasil lelang sitaan/rampasan/harta peninggalan dan pendapatan penjualan aset serta pemantauan dan pengawasannya.	✓			

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 47 dari 52



Tahun Temuan	No.	Induk Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Penanganan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Dilakukan	
2007	34	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda Tidak Memadai	0,00		X	N/A	✓	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik secara administrasi maupun hukum.	Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyelesaian Rencana PMK tentang penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. 2. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda di seluruh Indonesia. 3. Melakukan <i>up dating</i> data dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Eks Asing/Cina (SIMAAC) versi 1.0 untuk <i>master file</i> sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai). 4. Melakukan restrukturisasi Tim Asistensi Daerah (TAD) dengan menetapkan Kanwil DJKN sebagai ketua TAD (semula Gubernur) sehingga diharapkan peran TAD dalam penyelesaian ABMA/C lebih menjadi pro aktif.	✓				

Keterangan:

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 48 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Dilakukan	
										5. Pemerintah telah melakukan inventarisasi/pemeriksaan fisik sebanyak 401 aset dan telah menilai 157 aset. 6. Memberikan PMK 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) 7. Sampai dengan 31 Des 2010, Pemerintah telah melakukan inventarisasi sebanyak 1.009 aset, telah menilai 275 aset sebesar Rp1,45 triliun, dan menyelesaikan 5 aset.					
2007	35	Penyajian Tagihan TP/TGR Dalam LKPP Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	N/A		N/A	X	X	✓	BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera melakukan TGR terhadap kasus kerugian negara, serta mengintensifkan pengendalian atas proses, penagihan, dan pencatatan TGR.	Pemerintah mendorong K/L untuk melakukan TGR. KL telah melakukan pemantauan realisasi TP/TGR.	✓				

Keterangan :

- ✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
- X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 49 dari 52

Tahun Temuan	No	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Jutaan Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	Belum Dilakukan	
LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2006															
2006	36	Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Belum ada Sedangkan Untuk Subsidi dan Cadangan Benih Nasional (CBN) Tidak Efektif	N/A		N/A	N/A	X	✓	BPK merekomendasikan Pemerintah agar meningkatkan pengendalian atas pencatatan dan pelaporan hasil penjualan CBP maupun persediaan yang masih disimpan oleh Perum BULOG.	Pemerintah telah melakukan pengendalian dan pelaporan hasil penjualan CBP dan persediaan yang masih disimpan oleh PERUM Bulog dengan memadai	✓				
LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005															
2005	37	Pencatatan Aset Tetap Hasil Pengadaan Dana Dekonsentrasi Tidak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	N/A		N/A	N/A	N/A	✓	BPK merekomendasikan Pemerintah agar menginventarisasi aset tetap dari dana dekonsentrasi untuk selanjutnya ditetapkan statusnya.	- Pemerintah sedang mempersiapkan beberapa PMK sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No.6 Tahun 2006 di bawah koordinasi DJKN. - Pemerintah telah menetapkan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan aset dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.	✓				

Keterangan:

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 50 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2009	2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Dilakukan	
										- Pemerintah mendorong Peningkatan Pelaksanaan SABMIN pada Pemda yang menerima dana dekonsentrasi. - Pemerintah telah menerbitkan PP No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK No.156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. - Pemerintah akan mengefektifkan pelaksanaan PP tersebut dan menerapkan sanksi secara tegas sebagaimana telah diatur dalam PP tersebut. - Pemerintah telah menetapkan PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum TA 2011, diantaranya mengatur tentang				

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 51 dari 52

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Tribun Rupiah)	Temuan Berulang					Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut				Ketera- ngan
				2009	2008	2007	2006	2005		Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak- lanjuti		
										Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Belum Sesuai	Belum Ditindak- lanjuti	Ketera- ngan
											penatausahaan BMN Dekon TP yang belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola Barang , tetapi telah diserahkan kepada pihak ketiga dicatat sebagai Aset Lainnya.			

Keterangan :

- √ : Ada temuan berulang di tahun tersebut
X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2005-2010

halaman 52 dari 52

